

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani, 2011, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Cirebon, 2016, *Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon*, Kota Cirebon, Bappeda Kota Cirebon dan BPS Kota Cirebon.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2016, *Profil Kota Cirebon*. Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
- Bagir manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII.
- Bambang Yudoyono, 1999, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, 2016, *Penguatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarta.
- Djuhendah Hasan, 2008, *Sistem Hukum, asas-asas, dan Norma Hukum dalam pembangunan Hukum Indonesia*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Harry Alexander, 2004, *Panduan Perencanaan Peraturan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT. XSYS Solusindo.
- Hanif Nurcholish, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana.
- Inu Kencana Syafie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung, PT. Alumni.
- Lubis M. Solli, 2008, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni.
- Lukman Santoso, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mahendra Putra Kurnia dan Emilda Kuspraningrum, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Yogyakarta, Total Media.
- Maria Farida Indrati S, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan*, Depok, PT. Kanisius.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia : Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara

- Nuryati Widyastuti, 2016, *Ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Cipta Karya Kementrian Hukum dan Ham.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2006, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Reny Rawasita, 2009, *Menilai Tanggung jawab Sosial Peraturan Daerah*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gajah mada University Press.
- Rudi Soehardjo, 2004, *Mengenal Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota*, Semarang, CV Aneka Ilmu.
- Sarundajang, 2012, *Biroraksi dalam Otonomi daerah : upaya mengatasi kegagalan*, Jakarta Selatan, Kata penerbit.
- Sirajudin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah : Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press.
- Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press.
- Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta, Faza Media.
- Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryass, Rasyid, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VII, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Titik Triwulan, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, Ade Arif, Siti Khoiriah, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.

Jurnal

- Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”, *Jurnal Cita Hukum*, I, (Juni, 2014).
- Cora Elly Novianti, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”. *Pusat Kajian Konstitusi Universitas Moch, Sroedi Jember*, X, II (Juni, 2013).
- Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*, VIII, (Januari-Maret, 2014).
- Jusmiati, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012”, *eJournal Ilmu Pemerintahan UNMUL*, I (Mei, 2013).
- Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum Unsrat*, XXII (Januari, 2016).

- Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, X (Februari 2014).
- Petrus Agapa, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam membuat Peraturan daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009-2014”, *ejournal Renaissance*, II, (Agustus 2017).
- Retno Saraswati, “Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Artikel Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Edisi 87, (Desember, 2013).
- Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, XXIII, (Desember, 2016).
- Sunanda Haizel Fitri, “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *JOM Fakultas Hukum*, II, (Februari, 2015).

Perundang-Undangan

- R.I., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- R.I., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “Pemerintahan Daerah”.
- R.I., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- R.I., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang “Pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- R.I., Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang “Pembentukan Produk Hukum Daerah”
- R.I., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang “Pembentukan Produk Hukum Daerah”.

Internet

- “Anonim, Situs Resmi”, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, *Tentang Kota Cirebon*, <http://www.cirebonkota.go.id/dprd>. Diunduh pada hari Kamis, 4 Januari 2018, jam 15.00 WIB.
- “Anonim, Situs Resmi”, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon, *Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum*, Peraturan Daerah,

<http://hukum.cirebonkota.go.id>. Diunduh hari Senin, 23 Oktober 2017, pada Pukul 10.00.

Google Scholar, <https://scholar.google.co.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Imam Asmarudi, *Peran dan Alat Kelengkapan Dewan dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD*, 2010,

<http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/Cermin/article/view/52/61>,

diunduh pada hari Selasa, 20 Februari 2018, jam. 21.00 WIB.

Pemerintah Kota Cirebon, *Visi dan Misi Kota Cirebon Periode 2013-2018*, 2011,

http://www.cirebonkota.go.id/?page_id=47. Diunduh pada hari Senin, 20 November 2017, pukul 16.30 WIB.

UMY Repository, <http://repository.umy.ac.id/>.